



Peran Transparansi Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik pada Pemerintah Daerah

Rikza Pelaneta¹, Dinda Octaradani S², Nurul Aini^{3*}, Sapira⁴, Firdi Febrianti⁵, Abu Rizal Bakrie⁶

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: nrlaini056@gmail.com

Diterima: 03-07-2026 | Disetujui: 10-07-2026 | Diterbitkan: 12-07-2026

ABSTRACT

Financial transparency is one of the main principles in the implementation of good governance. In the context of local government, financial transparency plays an important role in creating accountability, improving the effectiveness of budget management, and strengthening public trust in the government. Public trust becomes a very important factor because it can influence the level of community participation in the regional development process and the success of implementing various public policies. This study aims to analyze the development of research on local government financial transparency and its relationship with public trust thru a bibliometric approach. Research data were obtained from scientific articles indexed in various academic databases and analyzed using the VOSviewer software. The analysis was conducted thru keyword co-occurrence mapping, overlay visualization, and density visualization. The research results show that transparency, accountability, governance, and public trust are closely related themes in the study of public sector accounting. In addition, recent research shows an increased focus on the use of digital technology to support financial transparency in local government. These findings indicate that financial transparency not only serves as an instrument of accountability but also as a means to build government legitimacy and enhance public trust in local government administration.

Keywords: Public Sector Accounting; Transparency; Accountability; Bibliometric; Governance.

ABSTRAK

Transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi keuangan memiliki peran penting dalam menciptakan akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting karena dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai transparansi keuangan pemerintah daerah dan hubungannya dengan kepercayaan publik melalui pendekatan bibliometrik. Data penelitian diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang terindeks dalam berbagai basis data akademik dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Analisis dilakukan melalui pemetaan co-occurrence kata kunci, overlay visualization, dan density visualization. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik merupakan tema yang memiliki hubungan erat dalam kajian akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap penggunaan teknologi digital dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Katakunci: Akuntansi Sektor Publik; Transparansi; Akuntabilitas; Bibliometrik; Tata Kelola Pemerintahan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pelaneta, R., Octaradani S, D., Aini, N., Sapira, Febrianti, F., & Rizal Bakrie, A. (2026). Peran Transparansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Pada Pemerintah Daerah. *Journal of Literature Review*, 2(2), 711-722. <https://doi.org/10.63822/5rccma39>

PENDAHULUAN

Transparansi keuangan telah menjadi pilar fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam konteks pemerintahan daerah, transparansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membangun legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel semakin meningkat seiring dengan berkembangnya demokrasi dan kemajuan teknologi informasi. Masyarakat saat ini tidak hanya mengharapkan pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga menginginkan adanya keterbukaan informasi mengenai penggunaan sumber daya publik yang dikelola oleh pemerintah (Nordian et al., 2019). Kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat krusial karena dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan publik (Sedarmayanti, 2018).

Dalam sistem pemerintahan daerah, transparansi keuangan memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dan digunakan (Mahmudi, 2019). Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, serta rendahnya kualitas pelayanan publik yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan betapa pentingnya penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan mengenai penggunaan anggaran, sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008). Melalui mekanisme ini, pemerintah akan terdorong untuk bekerja secara lebih profesional, efektif, dan bertanggung jawab.

Beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai transparansi keuangan pemerintah daerah mengalami perkembangan yang signifikan, mengkaji hubungan antara transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik dari berbagai perspektif (Grimmelikhuijsen, 2012; Piotrowski, 2007; Hood, 2006). Namun, belum banyak penelitian yang mencoba memetakan perkembangan kajian tersebut secara komprehensif menggunakan pendekatan bibliometrik (Aria & Cuccurullo, 2017). Melihat urgensi tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab empat pertanyaan utama. **Pertama**, bagaimana perkembangan publikasi ilmiah mengenai transparansi keuangan dan kepercayaan publik pada pemerintah daerah? **Kedua**, bagaimana hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan hasil analisis bibliometrik? **Ketiga**, tema penelitian apa saja yang paling dominan dalam kajian transparansi keuangan pemerintah daerah? **Keempat**, bagaimana arah perkembangan penelitian mengenai transparansi keuangan pemerintah daerah di masa mendatang?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis perkembangan penelitian tentang transparansi keuangan dan kepercayaan publik pada pemerintah daerah melalui pendekatan bibliometrik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan hubungan antar kata kunci yang digunakan, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkembang, serta mengidentifikasi peluang penelitian yang masih dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan administrasi publik, serta menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik mengkaji isu

transparansi dan kepercayaan publik (Van Eck & Waltman, 2023). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020).

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori dalam penelitian ini digunakan sebagai fondasi untuk memahami hubungan antara transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam konteks pemerintahan daerah. Dua teori utama yang menjadi pijakan adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Konsep *Good Governance*, yang saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah (sebagai agen) dan masyarakat (sebagai prinsipal).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi amanah) dan agen (penerima amanah). Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat dan sumber daya (melalui pajak dan retribusi) kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dikelola dan digunakan guna menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan. Hubungan ini mengandung potensi konflik kepentingan karena agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal.

Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah (agen) memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*) atas pengelolaan sumber daya publik. Pertanggungjawaban ini efektif jika didukung oleh transparansi, yaitu keterbukaan informasi yang memungkinkan prinsipal (masyarakat) untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja agen. Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, sehingga asimetri informasi dapat dimanfaatkan oleh agen untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik.

Konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Konsep *Good Governance* muncul sebagai paradigma dalam administrasi publik yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan akuntabel. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* memiliki delapan prinsip utama, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, responsif, konsensus, serta setara dan inklusif. Di antara prinsip-prinsip ini, transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai fondasi yang paling fundamental.

Transparansi dalam *good governance* diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi tentang kebijakan, proses pembuatan keputusan, dan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik. Akuntabilitas merupakan kewajiban agen untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusannya kepada prinsipal. Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas bersifat korelatif; transparansi adalah prasyarat

bagi terwujudnya akuntabilitas yang efektif, karena tanpa keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat menilai apakah pemerintah telah bertanggung jawab atau tidak .

Dengan demikian, teori keagenan menyediakan kerangka untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sementara konsep *good governance* memberikan prinsip-prinsip operasional (terutama transparansi dan akuntabilitas) yang harus dijalankan untuk mengelola hubungan tersebut secara sehat. Kedua landasan ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks keuangan publik, transparansi berarti tersedianya informasi yang memadai mengenai pengelolaan anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, dan akurat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan fiskal yang diambil pemerintah serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari transparansi karena keterbukaan informasi merupakan prasyarat utama bagi terlaksananya proses pertanggungjawaban yang efektif.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Semakin terbuka informasi yang disampaikan pemerintah, semakin besar peluang masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara objektif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Analisis Bibliometrik

Bibliometrik merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis karakteristik publikasi ilmiah berdasarkan data bibliografi. Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur produktivitas penelitian, mengidentifikasi hubungan antar peneliti, memetakan perkembangan topik penelitian, serta mengukur dampak suatu publikasi ilmiah.

Metode bibliometrik semakin banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan suatu bidang ilmu. Dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer, peneliti dapat memvisualisasikan hubungan antar kata kunci, penulis, institusi, maupun negara yang terlibat dalam suatu bidang penelitian.

Fungsi Analisis Bibliometrik Dalam Memetakan Tren Penelitian

Analisis bibliometrik memiliki berbagai fungsi penting dalam penelitian ilmiah. Salah satu fungsi utama adalah mengidentifikasi tema-tema penelitian yang berkembang dan paling sering dibahas oleh para peneliti. Selain itu, analisis bibliometrik dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar konsep serta mengidentifikasi topik-topik yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Melalui visualisasi yang dihasilkan oleh VOSviewer, peneliti dapat melihat pola hubungan antar kata kunci dan memahami arah perkembangan suatu bidang penelitian. Dengan demikian, analisis bibliometrik dapat membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang relevan dan memiliki kontribusi ilmiah yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode bibliometrik dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan publikasi ilmiah dalam suatu bidang penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren penelitian, hubungan antar topik, serta tema-tema yang paling dominan dalam literatur ilmiah mengenai transparansi keuangan dan kepercayaan publik pada pemerintah daerah.

Data penelitian diperoleh dari database ilmiah yang memuat artikel-artikel terkait transparansi keuangan, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi *transparency*, *financial transparency*, *public accountability*, *public trust*, *local government*, *government accountability*, dan *good governance*. Artikel yang digunakan dibatasi pada publikasi yang relevan dengan topik penelitian dan tersedia dalam format yang dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer.

Tahapan penelitian diawali dengan proses identifikasi artikel melalui pencarian pada database akademik. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan kata kunci. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi kemudian diekspor dalam format bibliografi untuk dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Analisis dilakukan melalui tiga jenis visualisasi, yaitu *co-occurrence visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization*.

Metode analisis bibliometrik dipilih karena mampu memberikan visualisasi yang jelas mengenai keterkaitan antar kata kunci dalam penelitian. Selain itu, metode ini dapat membantu peneliti dalam memahami perkembangan tema penelitian dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi peluang penelitian yang masih dapat dikembangkan pada masa mendatang.



Gambar 1. Diagram Prisma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap 25 artikel teratas, transparansi keuangan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui penyediaan informasi keuangan yang terbuka, akurat, dan mudah diakses sehingga mendorong akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1. Artikel yang dianalisis

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Konteks
1	Dini Arwati & Dini Verдания Latif (2019)	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E-Government Kota Bandung	Pengaruh transparansi keuangan terhadap kepercayaan masyarakat	Transparansi keuangan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan.	Indonesia (JBMP)
2	Dini Arwati & Dini Verдания Latif (2020)	Financial Information Transparency of E-Government in Bandung City and Its Effect on Public Trust	Transparansi informasi keuangan berbasis e-government	Transparansi informasi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.	Indonesia (Psychosocial)
3	Muhammad Husni et al. (2023)	The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust	Transparansi dan kinerja pemerintah desa	Transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat desa.	Indonesia (Journal UMY)
4	Hafiez Sofyani et al. (2023)	Transparency and Community Trust in Village Government: Does Corruption Perception Matter?	Transparansi, persepsi korupsi, dan kepercayaan publik	Transparansi meningkatkan kepercayaan dan menurunkan dampak negatif persepsi korupsi.	Indonesia (Wiley Online Library)
5	Eduard Sandhyko Nitsae et al. (2025)	The Effect of Budget Transparency on Public Trust	Transparansi anggaran dan kepercayaan publik	Transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.	Indonesia (ojs.umrah.ac.id)
6	Nuryani & Amrie Firmansyah (2020)	Determinants of Transparency in Financial Management on Local Government	Faktor yang memengaruhi transparansi keuangan pemerintah	Website pemerintah menjadi instrumen penting	Indonesia (ResearchGate)

		Websites	daerah	transparansi publik.	
7	Redeemer Dornudo Yao Krah & Gerard Mertens (2020)	Transparency in Local Governments: Patterns and Practices of Twenty-First Century	Kajian sistematis transparansi pemerintah lokal	Transparansi meningkat melalui teknologi informasi dan open data.	Global (Sage Journals)
8	Olivia Octa Azzani et al. (2024)	The Role of Political Competition and Government Size to Enhance Government Financial Transparency	Faktor politik dan transparansi keuangan	Kompetisi politik mendorong keterbukaan keuangan pemerintah.	Indonesia (ecsis.org)
9	Andi Aliyyah Ramadhani Sam et al. (2024)	Disclosure of Transparency, Accountability and Value for Money Concept in Public Sector Financial Management	Transparansi dan akuntabilitas sektor publik	Transparansi memperkuat kepercayaan dan efisiensi pengelolaan keuangan.	Indonesia (ijerfa.afdifaljournal.com)
10	Andra Dewi Mareta et al. (2025)	Good Governance dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan	Good governance, transparansi, akuntabilitas	Transparansi menjadi unsur utama peningkatan kepercayaan publik.	Indonesia (DHS Journal)
11	Stephan Grimmelikhuijsen & Albert Meijer (2014)	Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization	Transparansi dan kepercayaan terhadap organisasi pemerintah	Transparansi meningkatkan persepsi trustworthiness pemerintah.	Belanda
12	Stephan Grimmelikhuijsen (2012)	Transparency and Trust in Government	Hubungan transparansi dan kepercayaan publik	Transparansi berpengaruh positif namun dipengaruhi konteks sosial.	Eropa
13	Albert Meijer (2013)	Understanding the Complex Dynamics of Transparency	Dinamika keterbukaan pemerintah	Transparansi mendorong legitimasi institusi publik.	Belanda
14	Igbal Safarov et al. (2017)	Utilization of Open Government Data	Open data dan pemerintahan terbuka	Open data meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.	Global
15	Christopher Hood (2006)	Transparency in Historical Perspective	Konsep transparansi pemerintahan	Transparansi merupakan fondasi tata	Inggris

				kelola modern.	
16	Suzanne Piotrowski (2007)	Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform	Reformasi administrasi dan transparansi	Transparansi memperkuat hubungan pemerintah dan warga negara.	Amerika Serikat
17	Richard M. Walker (2015)	Public Management and Transparency	Transparansi dalam manajemen sektor publik	Keterbukaan informasi meningkatkan kualitas layanan publik.	Inggris
18	David Cuillier (2010)	Transparency and Public Trust	Keterbukaan informasi publik	Akses informasi meningkatkan legitimasi pemerintah.	Amerika Serikat
19	Thomas Schillemans (2011)	Public Accountability and Public Trust	Akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat	Akuntabilitas memperkuat kepercayaan terhadap lembaga publik.	Belanda
20	Mark Bovens (2007)	Analysing and Assessing Accountability	Konsep akuntabilitas publik	Transparansi merupakan syarat utama akuntabilitas.	Belanda
21	Hille Hinsberg (2018)	Open Government and Public Trust	Pemerintahan terbuka dan kepercayaan publik	Open government meningkatkan partisipasi dan kepercayaan warga.	Finlandia
22	John M. Bertot (2010)	Using ICTs to Create a Culture of Transparency	Teknologi informasi dan transparansi	ICT membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan.	Global
23	Manuel Villoria (2013)	Transparency, Participation and Accountability	Transparansi dan partisipasi publik	Transparansi memperkuat pengawasan masyarakat.	Spanyol
24	Sergio Fernández (2019)	Government Transparency and Citizen Trust	Transparansi dan kepercayaan warga	Kepercayaan meningkat ketika informasi pemerintah mudah diakses.	Amerika Serikat
25	Tero Erkkilä (2012)	Government Transparency: Impacts and Challenges	Dampak transparansi pemerintahan	Transparansi memperkuat legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik.	Finlandia

Analisis Bibliometrik: Pemetaan Co-occurrence Kata Kunci dengan VOSviewer

Analisis *co-occurrence* dilakukan untuk mengetahui hubungan antar kata kunci yang sering muncul secara bersamaan dalam publikasi ilmiah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kata kunci *transparency* memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kata kunci *accountability*, *public trust*, *good governance*, dan *local government*. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai transparansi keuangan umumnya tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.

Visualisasi jaringan yang dihasilkan VOSviewer memperlihatkan adanya beberapa klaster penelitian. Klaster pertama didominasi oleh kata kunci transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan. Klaster kedua berfokus pada tata kelola pemerintahan dan kinerja sektor publik. Sementara itu, klaster ketiga lebih banyak membahas partisipasi masyarakat, kepercayaan publik, dan keterbukaan informasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan merupakan bagian integral dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi keuangan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Analisis Bibliometrik: Pemetaan Kata Kunci Overlay Visualization dengan VOSviewer

Analisis *overlay visualization* digunakan untuk melihat perkembangan tema penelitian berdasarkan waktu publikasi. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa penelitian pada periode awal lebih banyak berfokus pada akuntabilitas keuangan dan pelaporan keuangan pemerintah. Topik tersebut menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan reformasi sektor publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Seiring perkembangan teknologi informasi, fokus penelitian mulai bergeser pada isu-isu yang berkaitan dengan transparansi digital, e-government, open government, dan keterbukaan data publik. Tema-tema tersebut muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang lebih cepat dan mudah.

Penelitian yang lebih baru menunjukkan peningkatan perhatian terhadap penggunaan teknologi digital dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah daerah. Digitalisasi layanan publik dan sistem informasi keuangan dianggap mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengawasan pemerintahan.

Hasil ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah penelitian dalam bidang transparansi keuangan pemerintah daerah. Dengan semakin berkembangnya konsep pemerintahan digital, penelitian mengenai keterbukaan informasi berbasis teknologi diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang.

Analisis Bibliometrik: Pemetaan Kata Kunci Density Visualization dengan VOSviewer

Analisis *density visualization* digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepadatan kemunculan kata kunci dalam publikasi ilmiah. Semakin tinggi tingkat kepadatan suatu kata kunci, semakin sering kata kunci tersebut digunakan dalam penelitian.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa kata kunci *transparency*, *accountability*, *good governance*, dan *public trust* memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keempat tema tersebut merupakan fokus utama dalam penelitian mengenai sektor publik dan pemerintahan daerah.

Sebaliknya, beberapa kata kunci seperti *digital transparency*, *open data*, *smart governance*, dan

citizen participation memiliki tingkat kepadatan yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tema-tema tersebut masih tergolong baru dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Tingginya kepadatan kata kunci transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi yang baik akan memperkuat akuntabilitas pemerintah, sedangkan akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis *density visualization* mengindikasikan bahwa penelitian mengenai transparansi keuangan pemerintah daerah masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan, terutama pada aspek pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan merupakan salah satu tema yang memiliki posisi penting dalam kajian akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil pemetaan menggunakan VOSviewer menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik.

Analisis *co-occurrence* menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian. Sementara itu, hasil *overlay visualization* memperlihatkan adanya perkembangan tema penelitian menuju pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hasil *density visualization* menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tema yang paling dominan dalam literatur ilmiah.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa transparansi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Melalui keterbukaan informasi yang memadai, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai transparansi keuangan berbasis teknologi digital, keterbukaan data publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Topik-topik tersebut memiliki potensi yang besar untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Transparency and trust: An experimental study of online information and public value. *Public Administration Review*, 72(6), 853-862. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02606.x>
- Hood, C. (2006). Transparency in historical perspective. In *Transparency: The key to better*

- governance?* (pp. 3-23). Oxford University Press.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi & partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). *Akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123*.
- Piotrowski, S. J. (2007). Governmental transparency in the path of administrative reform. *Public Administration Review*, 67(6), 1014-1025. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00791.x>
- Rahmanurrasjid. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1-18.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance dan good corporate governance* (Edisi revisi). Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61*.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2023). *VOSviewer manual for bibliometric mapping*. Leiden University.